

TAJUK RENCANA

Santri Siaga Jiwa dan Raga

JUMAT 22 Oktober 2021 hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional (HSN). Peringatan HSN baru dilakukan dalam beberapa tahun ini, khususnya setelah Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 pada 15 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta. Penetapan HSN dimaksudkan untuk meneladani semangat jihad para santri mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai HSN karena mengambil momentum dikeluarkannya Resolusi Jihad oleh Rais Akbar PBNU, Hadhratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari. Resolusi atau seruan ini berisi perintah kepada umat Islam untuk berperang (jihad) melawan tentara Sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan.

Resolusi tersebut mempunyai pengaruh luar biasa, yaitu mampu membakar semangat heroisme para santri, termasuk kiaiinya. Mereka lantas turun pesantren untuk melakukan jihad membela bangsa dan negara yang akan dijajah lagi. Tanpa rasa gentar dan dengan senjata seadanya, para santri maju dalam medan pertempuran di Surabaya. Ribuan santri gugur menjadi syuhada atau pahlawan. Puncak pertempuran tersebut pada 10 November. Tanggal tersebut sudah lama ditetapkan menjadi Hari Pahlawan.

Peringatan HSN 2021 ini mengangkat tema Santri Siaga Jiwa dan Raga. Tema ini cukup relevan dengan kondisi dan situasi saat ini. Melalui tema ini, para santri era milenial ini meneguhkan tekad dan semangatnya untuk terus berada di garda depan dalam membela bangsa dan Negara. Kata siaga berarti selalu siap sedia, kapan sa-

dan di mana. Sedang jiwa raga berarti akan berjuang secara total dengan segala daya yang dimilikinya.

Hal ini bisa dimaknai sebagai bentuk pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia dan mewujudkan perdamaian dunia. Siaga Jiwa Raga juga merupakan komitmen seumur hidup santri untuk membela tanah air yang lahir dari sifat santun, rendah hati, pengalamanan, dan tempaan santri selama di pesantren. Bagi santri, NKRI merupakan harga mati.

Tentu, tantangan dan ancaman pada masa kini berbeda dengan zaman dulu. Namun demikian, ancaman yang terus berdatangan sampai sekarang tidak kalah berbahayanya bagi kelangsungan NKRI. Hingga saat ini tidak pernah ada berhentinya upaya pihak tertentu yang ingin memecah belah bangsa, menghancurkan persatuan yang sudah terbina selama ini. Antara lain berseliwerannya informasi bohong atau hoaks, adanya upaya-upaya mengadu domba sesama warga Negara, bahkan kadang muncul upaya memancing kerusuhan. Hal-hal yang terkait SARA, yaitu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan sering dimanfaatkan untuk menyulut konflik sosial.

Karena itu, adanya kesiapsiagaan secara terus menerus sangat penting untuk terus membentengi keberlangsungan NKRI. Siap siaga secara jiwa dan raga ini kiranya juga perlu terus ditumbuhkan di dada setiap warga bangsa dan negara Indonesia.

Selamat Hari Santri Nasional. Kiprah nyata kaum santri masih akan terus ditunggu oleh Ibu Pertiwi. (*)

Ujung (Tanduk) Kejayaan Santri

ADA semacam euforia kegembiraan pada diri santri, sejak enam tahun silam, karena Presiden Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional (HSN). Pasalnya, puluhan tahun santri mengabdikan untuk bangsa namun tidak pernah mendapatkan apresiasi. Lembaga pendidikan santri (baca: pesantren) pun bak anak tiri yang terdiskriminasi, tidak pernah mendapat sentuhan kasih sayang. Setelah ada penetapan HSN tahun 2015, santri dan pesantren mulai dipuja dan dimanja-manja.

Rentetan penetapan Hari Santri Nasional adalah adanya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren hingga Perpres No 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. UU dan Perpres tentang pesantren ini menjadi jaminan keikutsertaan pemerintah dalam pemberian dana untuk penyelenggaraan pendidikan pesantren. Dengan adanya, sarana dan prasarana pendidikan santri yang selama ini sangat sederhana berangsur-angsur mulai bisa mengikuti perkembangan zaman. Suara santri juga mulai banyak didengarkan pemerintah dan khalayak.

Terlambat
Sejatinya, reward yang diberikan pemerintah kepada santri tidaklah berlebihan, bahkan dapat dikatakan terlambat. Bagaimana tidak? Santri merupakan salah satu komponen terbaik bangsa dalam memperjuangkan, mempertahankan, serta mengisi kemerdekaan. Dengan semangat hubbul wathon minal iman (cinta tanah air merupakan bagian dari iman), para santri selalu siap-sedia berjihad memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penetapan HSN juga tidak dapat dilepaskan dari semangat kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Penetapan merujuk peristiwa seruan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang diprakarsai Hadhratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari. Seruan jihad bela negara ini menjadi salah satu cikal bakal yang membuat Indonesia bisa berdaulat dan merdeka se-

Anton Prasetyo

cara penuh, serta diakui oleh internasional. Seruan jihad ini menjadi upaya kaum santri dalam membakar semangat melawan kolonialisme Belanda dan Sekutu yang kembali datang ke Indonesia melalui Agresi Militer I. Salah satu pertempuran dahsyat yang sampai sekarang dikenang sebagai Hari Pahlawan adalah pertempuran 10 November 1945 yang menewaskan Jenderal Sekutu asal Inggris



KR-JOKO SANTOSO

AWS Mallaby.

Atas jasa besar inilah, para santri layak mendapatkan reward besar dari pemerintah dan khalayak. Hanya saja, jangan sampai santri terninabobokkan reward yang akhir-akhir ini mulai diberikan. Jiwa santri adalah jiwa mandiri. Jangan sampai santri ta'aluq (bergantung) kepada pemerintah, yang karena ada UU dan Perpres tentang pesantren menjadikannya tidak berdaya tanpa kehadiran dana dari pemerintah.

Fokus

Para santri tidak perlu merasa bangga berlebihan dalam menyikapi reward yang ada. Para santri harus tetap mengutamakan

kan pada fokus pembelajaran agama yang disampaikan oleh kiai. Reward yang ada harus bisa mendukung kualitas dan kuantitas belajar santri. Jika tidak, jangan sampai santri mengorbankan waktu hanya untuk mengejanya. Terimalah dana jika sudah diberikan dan jangan tamak (berharap) saat tidak/belum diberikan.

Kerja keras santri dalam menjaga kualitas diri tidak bisa berhasil dengan maksimal tanpa dukungan dari pemerintah. Pemerintah harus mengetahui bahwa karakter suci santri berbeda dengan keumuman masyarakat. Dalam bidang perolehan dana dari pemerintah misalnya, santri tidak diajarkan untuk membuat proposal ataupun pengajuan penuh dengan ribet birokrasi. Pertimbangan mereka bukan ketidakmampuan/ketidakbiasaan untuk tertib administrasi namun upaya menjaga hati agar hati selalu bergantung pada Allah, tidak tidak ternodai oleh selain-Nya.

Pemerintah dituntut mampu mengidentifikasi santri atau pesantren sungguhan untuk langsung diberikan reward tanpa sarat administratif yang bertele-tele. Pemerintah juga harus waspada jangan sampai salah saran memberikan kurangan dana kepada santri atau pesantren abal-abal. Meski mengajukan permohonan dana dengan rapi dan tertib administrasi. □

*) Anton Prasetyo MSos, Direktur Madrasah Diniyah Baitul Hikmah, Alumnus Pondok Pesantren Nurul Ummah Yogyakarta

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Survei Lingkungan Belajar

MENTERI Nadiem Makarim resmi mengganti format ujian Nasional menjadi Asesmen Nasional. Asesmen Nasional tidak semata sebagai pengganti Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Tetapi juga difungsikan sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan yang dilakukan Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Asesmen Nasional yang disingkat AN diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional. AN diperuntukkan untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala serta mendorong terciptanya perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Penilaian tersebut didasarkan pada kualitas proses belajar mengajar dengan menggunakan tiga instrumen utama, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Survei Karakter dan juga Survei

Survei lingkungan belajar digunakan untuk mengukur kualitas serta iklim sekolah, baik iklim keamanan maupun kebhinekaan. Diharapkan nantinya iklim tersebut mampu mendukung kualitas pembelajaran yang berkualitas. Survei Lingkungan Belajar dilakukan pada September dan Oktober 2021. Dalam asesmen ini guru diminta mencermati dan mengisi puluhan pertanyaan baik yang berhubungan langsung dengan proses pengajaran maupun tidak.

Menimbulkan Kontroversi
Survei Lingkungan Belajar yang digelar kementerian mendapat tanggapan beragam dari sejumlah pihak. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan Guru (P2G) Satriawan Salim menyebutkan butir soal yang tertera dalam Asesmen Lingkungan Belajar kurang sesuai dengan apa yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (AN).

Alfian Dj

Bahkan lebih terkesan memetakan preferensi politik dan juga paham keagamaan para guru.

Kritik senada terkait dengan butir butir yang ada dalam survei lingkungan belajar juga dilontarkan Ketua Majelis Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno. Dalam penilaiannya pertanyaan Survei Lingkungan Belajar belum menunjukkan ukuran evaluasi pendidikan. Bahkan pertanyaan yang ada bisa menimbulkan kontroversi karena adanya polarisasi agama, ras, kesukuan bahkan politik.

Bagi guru yang telah mengikuti Survei tentu ada yang bertanya-tanya terkait dengan relevansi butir pertanyaan dengan tujuan yang akan dicapai. Banyak pertanyaan yang isinya jauh dari konteks peningkatan mutu pendidikan, bahkan lebih banyak mengarah pada isu-isu yang bisa memunculkan perdebatan baik politik, ras, agama serta jender.

Beberapa pertanyaan yang muncul harusnya hanya menjadi bagian dari hak privat guru, akan tetapi hal tersebut justru dimunculkan secara terbuka dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan ada yang mengarah pada perdebatan isu gender terkait kepemimpinan perempuan di sekolah, sajian makanan yang mempunyai hukum tersendiri dalam agama, perayaan hari besar keagamaan. Juga doa bersama, cara berpakaian, sampai keberpikahan guru pada pemilihan ketua kelas yang calonnya seagama bahkan sesuku. Ada juga pertanyaan terkait kesempatan untuk beribadah dan meningkatkan keimanan.

Harus Menentramkan
Ke depan semua kita berharap

kebijakan serta program yang dilakukan oleh Kemendikbudristek tidak lagi memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Umur bangsa ini sudah menginjak tujuh puluh enam tahun, Bhinneka Tunggal Ika telah lama kita jadikan sebagai semboyan bangsa.

Tugas pemerintah harusnya menentramkan dan menjaga harmoni kesekelompokan, keguyuban dalam bingkai kebhinekaan yang telah berjalan dengan baik, bahkan jauh sebelum bangsa ini lahir. Di sisi lain lembaga lembaga pendidikan yang di kelola organisasi kemasyarakatan masih terus membuka diri bagi semua golongan tanpa membedakan latar belakang apapun.

Bangsa kita masih punya pekerjaan rumah untuk menyiapkan generasi emas. Generasi yang nantinya diharapkan mampu menjaga kedamaian dan persatuan. Dalam bingkai keberagaman seperti yang dicita-citakan founding fathers bangsa ini. □

*) Alfian Dj SH MH, Staf Pengajar Muallimin Yogyakarta, Mahasiswa Program Doktor Fak. Hukum UII

Pojok KR

Indeks perlindungan anak DIY Tertinggi.

-- Jadikan provinsi ramah anak!

Jemaah haji harus akrab aplikasi. -- Para pembimbing mesti mengajari.

Gunungkidul ujicoba 27 objek wisata. -- Semoga sukses dan disusul objek lainnya

Beraba

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

DIY dan Tata Kota

SEIRING dengan dinamika perkembangan dan pengembangan DIY, khususnya ketersediaan tanah dan aspek tata ruang dalam memenuhi berbagai kebutuhan, di mana segala permasalahan dan tantangannya perlu menjadi perhatian dan dihadapi oleh semua pihak agar terwujud DIY menjadi kota yang sehat, efisien, tertanam dan mensejahterahkan (konduktivitas).

Meski bukan pakar planologi, setiap orang yang melihat, apalagi bertandang ke sebuah kota pasti akan merasakan sensasi dan kualitas pengelolaannya.

Tentunya kita tidak menghendaki salah kedaden, di mana pada suatu keadaan menjadi dengan mudahnya dikatakan suatu kondisi yang terjadi adalah kesalahan akumulatif dan kolektif.

Oleh karena itu, paling tidak ada beberapa point yang perlu saya kemukakan/usulkan yaitu pertama, perlunya dibuka diskusi/kajian publik, tentunya setiap Pemda mempunyai master plant yang berpayung hukum, namun karena menyangkut kepen-

tingan vital masyarakat, maka diperlukan pemaparan semacam kajian publik untuk menjadi evaluasi bagi semua pemangku kepentingan.

Kedua, bank tanah yang berorientasi kemasyarakatan kiranya menjadi perhatian dan PR bersama, di mana pemerintah dan atau swasta memploting dengan mempertahankan dan menambah ketersediaan tanah untuk mewujudkan tata ruang/keidealan kota baik untuk saat ini maupun dalam rentang waktu panjang yang berorientasi kemasyarakatan.

Ketiga, isu lingkungan dalam melestarikan dan menyeimbangkan ekosistem tetap senantiasa menjadi perhatian plus pentingnya kontribusi semua pihak. Dengan demikian label Kota Pelajar, Pariwisata yang menentramkan tetap terjaga, sehingga tidak berlebihan hari ini dan yang akan datang Yogya tetap istimewa dan Saemen (Sehat, Asri, Efisien dan Mensejahterakan). □

*) Dipo Hadjid, Selokraman 72, Kotagede, Yogya.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mუსsahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984). Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurija Nugroho Samawi SE MM MSC. Direktur Produksi: Bakoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Rekor: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. Banyumas : Jalan Per Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro : Driyanto. Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyaris Utama, Kepala Biro : Drs M Thoha. Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.